KECAMATAN WOTU

LAPORAN KINERJA

Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Jalan A. Pandangai No. 1, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Wotu, 07 Januari 2025

Camat Wotu,

HASIS DAWI, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : **19700908 200312 1 004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Maksud dan Tujuan 4
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 5
1.4 Sumber Daya Aparatur 10
1.5. Isu Strategis 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
2.1 Rencana Strategis 15
2.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 15
2.3. Indikator Kinerja Utama 16
2.4. Perjanjian Kinerja 19
2.5. Rencana Anggaran Kecamatan Wotu Tahun 2025 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 26
3.2 Analisis Capaian Kinerja 28
3.2.1. Capaian Sasaran Strategis I 43
3.2.2. Capaian Sasaran Strategis II 29
3.3. Realisasi Anggaran 68
3.4. Budaya Kerja Mempengaruhi Pencapaian Organisasi 86
BAB IV PENUTUP 87

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan IV Perangkat Daerah disusun sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program, dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari kewajiban untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil.

Melalui laporan kinerja ini, dapat diketahui sejauh mana capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja program yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan IV yaitu yaitu Oktober-Desember 2025. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, identifikasi hambatan yang dihadapi, serta dasar dalam merumuskan langkah perbaikan dan strategi tindak lanjut pada triwulan berikutnya.

Dengan adanya laporan kinerja ini, diharapkan Kantor Kecamatan Wotu mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi antar bidang, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Triwulan IV Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama 1 (satu) triwulan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini juga menjadi alat kendali untuk menganalisis capaian setiap program dan kegiatan serta mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur :

1. **Camat;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
   b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
   c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum
   d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.

2. **Sekretaris Camat;** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
   b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dibidang umum dan keuangan; dan
   c. Pelakasanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

   Sekretaris camat membawahi beberapa bagian dan seksi antara lain :

1) **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huru b angka 1 dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

   a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
   b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
   c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

2) **Subbagian Umum dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

   Kepala Subbagian Umum **dan Keuangan** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggaraan fungsi :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
   b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuan dengan tugas dan fungsinya.

3. **Seksi Pemerintahan Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huru c dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai **tugas** pokok memimpin dan melaksakanan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

   Kepala seksi pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum
   b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** sebagaimana dimaksud dalam pasl 2 ayat (2) huruf d dipimpin oleh kepala seksi,mempunyai **tugaspokok** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun uraian tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

   Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaran fungsi :

   a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaaan masyarakat dan desa;
   b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa
   c. Pembinaan dan pelasanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaran fungsi :

   a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
   b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketrtiban umum;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Kepala Seksi Pelayanan Umum;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai t**ugas pokok** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
   b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Wotu

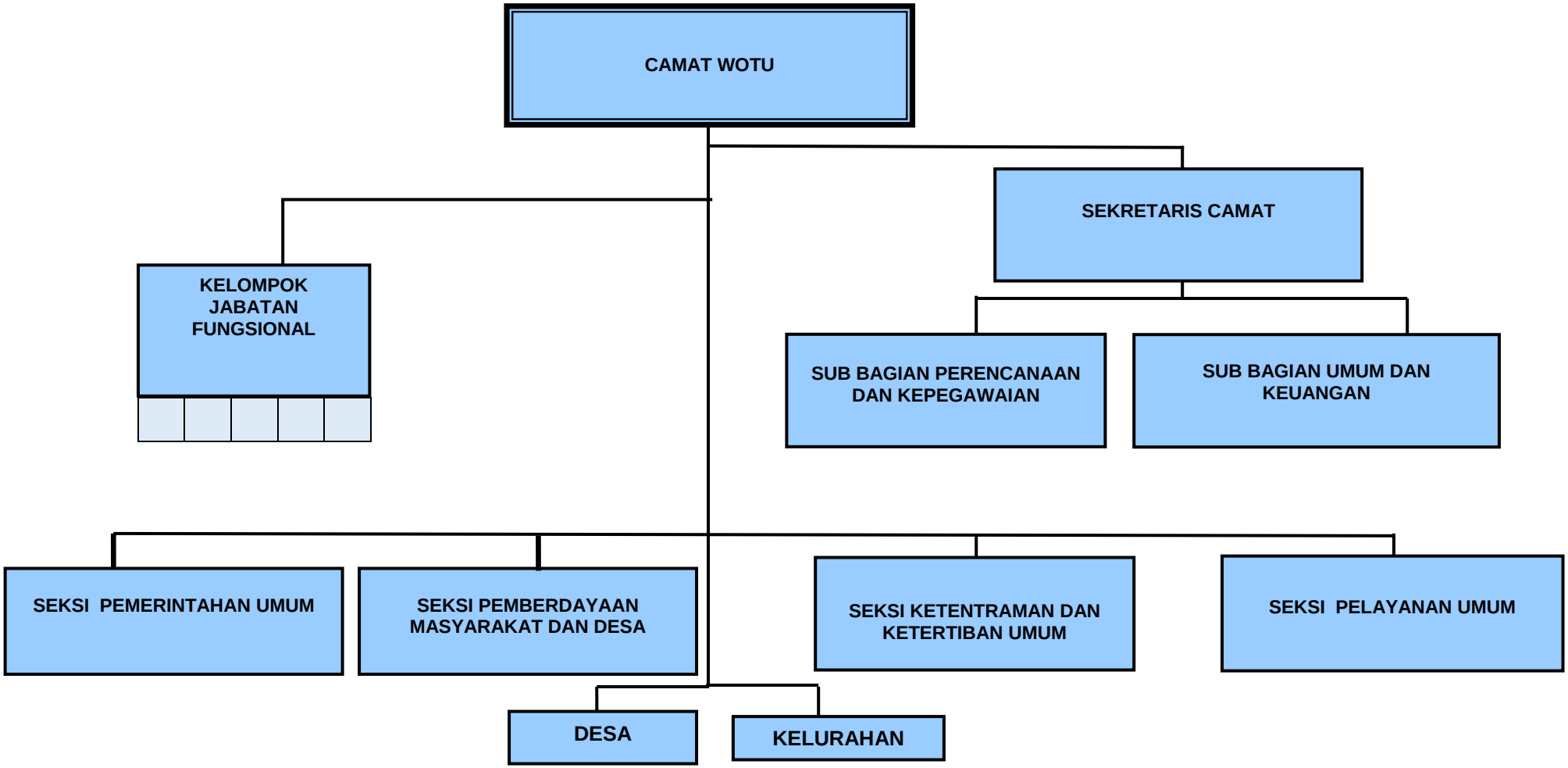

Sumber: Peraturan Bupati No 56 Tahun 2016

1.4 Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Wotu secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai, Sistem Prosedur serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Wotu dan Kantor Kelurahan Wotu adalah 25 (Dua Puluh Lima) orang ASN dan 4 (Empat) orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan data Kepegawaian, jumlah pegawai negeri sipil Kecamatan Wotu pada tahun 2025 Sebanyak 25 Orang, yang tersebar dalam Enam golongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	**B**	**C**	**D**	
1	Golongan IV	1	1	-	-	2
2	Golongan III	4	5	1	3	14
3	Golongan II	-	-	2	4	6
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	Golongan IX	2				2
6	Golongan V	2				2
JUMLAH						**26**

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

2. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Wotu memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat SMA/SMP hingga Strata 2 (S2). Komposisi tingkat pendidikan ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Rincian jumlah ASN menurut golongan dan jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				
		S2	**S1/D4**	**D2/D3**	**SMA/SMP**	**JUMLAH**
1	Golongan IV	2	-	-	-	2
2	Golongan III	-	12	-	2	14
3	Golongan II	-	-	-	6	6
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	Golongan IX	-	2	-	-	2
6	Golongan V	-	-	-	2	2
JUMLAH		**2**	**14**		**10**	**26**

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

3. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Wotu terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Pembagian ini mencerminkan peran dan tanggung jawab masing-masing ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Sebaran jumlah ASN menurut jabatan dan eselon disajikan pada Tabel 1.3 berikut, yang menunjukkan bahwa sebagian besar ASN menduduki jabatan struktural, khususnya pada eselon IV A/B dan non eselon.

Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Eselon				Jumlah
		II/A	III A/B	IV A/B	Non Eselon	
1	Struktural	0	2	6	14	24
2	Fungsional	0	2	0	0	2
3	Fungsional Umum	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	4	6	14	26

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja ini terdiri atas beberapa kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK), serta tenaga dengan status upah jasa. Komposisi ini menggambarkan keberagaman status kepegawaian yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu. Rincian jumlah ASN menurut status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIN		JUMLAH
1	PNS	20
2	CPNS	2
3	PTT	-
4	PPPK	4
5	UPAH JASA	4
JUMLAH		**30**

Sumber : Kecamatan Wotu.

5. Sarana Prasarana

Adapun pada sarana prasarana Kecamatan Wotu memiliki sebuah gedung diatas lahan tanah seluas 3.745 M^2. Rumah Jabatan Camat dibangun diatas lahan tanah seluas 1.295 M^2. Serta berdasarkan Laporan Inventarisasi Asset OPD Kecamatan Wotu , sarana prasarana yang dimiliki sampai dengan akhir tahun 2024 antara lain :

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	Kecamatan :		
1.	Rujab	1 Unit	Baik
2.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
3.	Gedung Serba Guna	1 Unit	Baik
4.	Tanah Kantor Camat	3,745 M^2	Baik
5.	Tanah Bangunan Rujab	1,295 M^2	Baik
6.	Mobil Operasional Camat	1 Unit	Baik
7.	Sepeda Motor	5 Unit	Baik
8.	Meja Rapat	5 Buah	1 Kurang Baik
9.	Meja Kerja b1/2 biro	11 Buah	Baik

10.	Kursi Kerja Putar	13 Buah	10 Baik, 3 Rusak
11.	Kursi Rapat	145 Buah	Baik
12.	Kursi Tamu	4 Buah	Baik
13.	AC ½ PK	3 Unit	Baik
14.	Lemari Arsip Kayu	2 Buah	Baik
15.	Komputer / PC	5 Buah	4 Baik, 1 Rusak
16	Printer	6 Buah	5 Baik, 1 Rusak
17	Lemari Filling Kabinet	5 Buah	Baik
18	Laptop	5 Buah	Baik
19	Papan Pengumuman	1 Buah	Baik
20	Mic	1 Set	Baik
21	Mesin Rumput Potong Gendong	2 Buah	1 Baik , 1 Rusak
22	Dispenser	2 Buah	Baik
23	Lori-Lori	2 Buah	Baik
24	Pompa Tangan	2 Buah	Baik
25	Bangku Tunggu Besi	3 Buah	Baik
26	Kipas Angin	4 Buah	Baik
27	Layar Proyektor	1 Buah	Baik
28	Sound System	2 Set	Baik
29	Genset	1 Buah	Baik

Sumber data : Kecamatan Wotu

1.5. Isu Strategis

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Wotu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baikdan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah, pada Kantor Kecamatan Wotu juga tentunya ditemukan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Wotu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur kecamatan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
2. Percepatan transformasi digital pemerintahan kecamatan dan peningkatan literasi digital aparatur serta masyarakat.
3. Penguatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah dan pelayanan publik.
4. Penguatan peran dan kewenangan kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan kewilayahan secara efektif
5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan pemerintahan kecamatan.
6. Pemerataan dan inovasi pelayanan publik berbasis kewilayahan untuk menjangkau seluruh masyarakat.
7. Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman wilayah
8. Penguatan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kinerja, inovasi, dan pelayanan prima
9. Peningkatan kemampuan adaptif dan responsivitas kecamatan terhadap perubahan lingkungan strategis melalui penguatan kapasitas aparatur, inovasi pelayanan publik digital, serta kolaborasi lintas sektor dan masyarakat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Renstra (Rencana Strategis) Kantor Kecamatan Wotu disusun berpedoman pada Peraturan Derah kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang memuat Tujuan, Sasaran , Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan Wotu sebagai Perangkat Daerah di Luwu Timur. Kemudian berdasarkan Dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Renja (Rencana Kerja) Tahunan Kecamatan Wotu .

Dalam upaya Mewujudkan Visi Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 yaitu **"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"** maka Kantor Kecamatan Wotu Melaksanakan Misi Ke-5 dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu ***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital"***, sebagai amanat bagi kantor Kecamatan Wotu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah yang jelas akan memberikan Perangkat Daerah Arah Kerja yang k gbb \terukur, mampu menyusun strategi dan kebijakan yang tepat, serta dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Selain itu, tujuan dan sasaran menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan perangkat daerah merupakan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka menengah (lima tahun), sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, berikut disajikan Tujuan Kecamatan Wotu :

"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas"

Sementara itu, **sasaran perangkat daerah** adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai sebagai penjabaran dari tujuan. Adapun sasaran dari Kecamatan Wotu adalah Sebagai Berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan perangkat daerah untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis. IKU bersifat spesifik, terukur, relevan, dan menjadi tolak ukur utama yang memastikan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja berjalan efektif. Tanpa IKU, tujuan pembangunan hanya bersifat normatif dan sulit diukur pencapaiannya.

Dasar hukum penyusunan IKU tercantum dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP** dan **PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014**, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah merumuskan indikator kinerja utama sebagai bagian dari manajemen kinerja. Dengan demikian, IKU bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga pondasi penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat Matriks hubungan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kecamatan Wotu dalam Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wotu

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu	Nilai AKIP Perangkata Daerah	• Nilai AKIP adalah data dan informasi yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil pengukuran terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. • Nilai Hasil pengukuran dari Nilai AKip di Konversi menjadi 6 Kategori yaitu: • Sangat memuaskan (AA)= 90-100 • Memuaskan (A)= 81-89 • Sangat Baik (BB)= 70-79 • Baik (B)= 60-69 • Cukup (CC)= 50-59 • Kurang (C)= 40-49 • Sangat Kurang (D)= 1-30 • E= 0 • Formulasi: Nilai AKIP=(0,30×Nilai Perencanaan)+ (0,30×Nilai Pengukuran)+ (0,15×Nilai Pelaporan)+ (0,25×Nilai Evaluasi Internal)	Tingkat akuntabilitas kinerja organisasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah melalui instrumen evaluasi AKIP. • Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah melalui penyusunan Nilai AKIP yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai tingkatkeberhasilanperencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian kinerja organisasi.	LHE Iinspektorat Kabupaten Luwu Timur	Camat
2	Menigkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	• Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil pengukuran dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang sesuai antara harapan dan kebutuhan.	• Tingkat kepuasan masyakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Camat

	pemerintahan Kecamatan Wotu		• Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan kategori : • Tidak baik dengan nilai presepsi 1 • Kurang baik dengan nilai presepsi 2 • Baik dengan nilai presepsi 3 • Sangat baik dengan nilai presepsi 4 NILAI PERSEPSI / NILAI INTERVAL (NI) / NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) / MUTU PELAYANAN (x) / KINERJA UNIT PELAYANAN (y) 1 / 1,00 – 2,5996 / 25,00 – 64,99 / D / Tidak baik 2 / 2,60 – 3,064 / 65,00 – 76,60 / C / Kurang baik 3 / 3,0644 – 3,532 / 76,61 – 88,30 / B / Baik 4 / 3,5324 – 4,00 / 88,31 – 100,00 / A / Sangat baik $Nilai\ Perunsur = \frac{Jumlah\ Per\ Unsur}{Jumlah\ Responden}$ $Bobot\ Nilai\ Penimbang = \frac{1}{Total\ Unsur}$ $Nilai\ Persepsi\ Tertimbang: = Total\ Nilai\ Perunsur\ x\ Nilai\ Penimbnag$ $IKM = Total\ Nila\ Persepsi\ Tertimbangx\ 25$	aparatur penyelenggara pelayanan public (rumah sakit) dengan pengisian kuesioner. • Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah melalui penyusunan indiks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan rumah sakit • Indeks kepuasan masyarakan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaiakan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya		

Tabel 2.2

Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Dan Target Kecamatan Wotu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Transisi 2024	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir RENSTRA
				2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Penyelerangaraan pemerintahan dan pelayanan public yang berkualitas (T1)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (S1.1)	Persentase pelayanan yang tepat waktu dan sesuai SOP (IT.1)	0	100	100	100	100	100	100
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (IS.1.1)	75	70.00	70.35	70.75	71.2	71.7	72.25
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (S1.2)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)(IS.1.2)	78.60	85	85.3	85.45	85.65	85.95	86.5

Sumber: Kecamatan Wotu

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara Atasan dan bawahan untuk melaksanakan program, kegiatan, serta target kinerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini memuat sasaran, indikator, dan target kinerja yang harus dicapai dalam satu periode. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrak kinerja yang menunjukkan komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Keberadaan perjanjian kinerja sangat penting dalam perencanaan karena memberikan arah yang jelas, menjadi dasar penyusunan strategi dan pengelolaan sumber daya, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja. Selain itu, perjanjian kinerja juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sehingga hasil pembangunan dapat diukur secara obyektif dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA (Rencana Strategis) 2025-2029, RENJA (Rencana Kerja) 2025, IKU dan APBD 2025, dimana Kecamatan Wotu akan melaksanakan 6 Program, 17 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan.

Untuk dapat mengukur Keberhasilan implementasi dari rencana startegis Tahun 2025, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur telah mentapkan target untuk masing masing Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan. Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Wotu Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	85

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Penetapan Kinerja dengan sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah di tetapkan oleh Kecamatan Wotu Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur Sebesar Rp.3.008.727.835 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp.2.971.427.835 dan belanja modal sebesar Rp. 37.300.000. Secara lengkap anggaran pada program Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran	Kegiatan
1	Program Penjunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.894.625.435	APBD
2	Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp6.019.500	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp68.599.750	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp9.175.000	APBD

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp25.248.500	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp5.059.650	APBD

2.5. Rencana Anggaran Kecamatan Wotu Tahun 2025

Rencana anggaran merupakan bagian penting yang berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja. Rencana anggaran disusun untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan benar-benar sejalan dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Agar target tersebut dapat direalisasikan secara efektif, diperlukan dukungan sumber daya, terutama berupa anggaran yang memadai dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti Renstra, Renja, dan RKPD, serta dituangkan dalam APBD. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian anggaran tersebut dirincikan berdasarkan Program, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**6.019.500**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**100%**	**6.019.500**

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	6.019.500
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**100%**	**68.599.750**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**100%**	**68.599.750**
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.512.950
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan	57.086.800
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**100%**	**9.175.000**
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**100%**	**5.900.000**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	3.425.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh masyarakat	4 Laporan	2.475.000
	Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**100%**	**3.275.000**
	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	*3.275.000*

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**100%**	**25.248.500**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	**100%**	**25.248.500**
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Dokumen	25.248.500
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**100%**	**5.059.650**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**100%**	***5.059.650***
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	2.484.850
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	1.324.800
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2.894.625.435**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**35.930.500**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	1.680.5000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3.554.950
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	2.724.850

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	12.845.700
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**2.302.035.653**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.278.815.653
	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	23.220.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**100%**	**10.290.000**
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	5.790.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**12.239.850**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3.071.850
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Orang	9.168.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**251.756.800**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	2.125.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Paket	7.330.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Paket	11.799.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Dokumen	4.200.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	156.450.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	69.852.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**37.300.000**

	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	37.300.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**192.907.632**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	13.173.750
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	37.748.882
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	5.025.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	136.960.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**52.165.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	18.995.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8.170.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	25.000.000
		JUMLAH	**2.041.202.244**

Sumber: Kecamatan Wotu

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan secara transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Prinsip ini menekankan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pelaporan sehingga setiap penggunaan sumber daya negara dapat ditelusuri kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penerapan akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui instrumen perencanaan dan pelaporan .Maka dari itu Kecamatan Wotu selaku Instansi Pemerintah yang melayani Masyarakat Melakukan Akuntabilitas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sarana untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Wotu Triwulan IV memberi gambaran penilaian mengenai tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2025-2029. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator sasaran yang telah dicapai pada Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan Kecamatan Wotu. Setiap indikator mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Data capaian

diperoleh dari laporan kinerja, hasil monitoring dan evaluasi, serta sumber data pendukung lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengukuran capaian kinerja ini, Kecamatan Wotu dapat menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan kinerja di masa mendatang, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Tingkat capaian Kinerja Kecamatan Wotu di peroleh dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi di ukur dari setiap Komponen yang ada dengan Kategori Sebagai Berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Nilai Angka	Predikat	Keterangan
1	>90	AA	Sangat Memuaskan – kinerja melampaui target, efektif, efisien, dan inovatif
2	>80-90	A	Memuaskan – kinerja mencapai target dengan efektivitas dan efisiensi baik
3	>70-80	BB	Baik – sebagian besar target tercapai, masih ada ruang perbaikan
4	>50-60	B	Cukup – target tercapai secara minimal, efektivitas dan efisiensi terbatas
5	>30-50	C	Kurang – sebagian besar target tidak tercapai, kinerja belum optimal
6	0-30	D	Sangat Kurang – kinerja jauh di bawah target, tidak efektif dan tidak efisien

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antara target dan realisasi, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun hambatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Wotu Pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III TAHUN 2025	CAPAIAN (%)	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70	60.59	86.5%	Belum Mencapai Target
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85,15	100.17%	Mencapai Target

Sumber:Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

3.2 . Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan IV Tahun 2025, selanjutnya dilakukan analisis terhadap capaian kinerja Kecamatan Wotu. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut.

Melalui analisis capaian kinerja ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Hasil analisis ini juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya, guna memastikan target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.

3.2.1. Capaian Sasaran Strategis I

"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-5 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yaitu " ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif***", dan tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik". Sasaran ke-1 ini didukung oleh Kantor Kecamatan Wotu yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan lingkup Kecamatan. Untuk mengukur capaian sasaran ini, terdapat 1 (Satu) **indikator kinerja** yaitu **Nilai AKIP Kecamatan Wotu** dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Triwulan IV Pada tahun 2025

Formulasi indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian target adalah **"Nilai AKIP berdasarkan LHE Inspektorat"**. Target indikator kinerja pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 70 (Kategori BB) . Namun, nilai tersebut belum dapat dibandingkan dengan realisasi akhir Tahun 2025 karena proses penilaian AKIP dilaksanakan pada awal tahun 2026. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan menggunakan **realisasi Nilai AKIP Triwulan III Tahun 2025**.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat pada Triwulan I Tahun 2025**,** diperoleh nilai **60.59 (kategori B)**. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realiasasi TW IV 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	70	60.59	86.5%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dan beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	2022	73	63,24	86,63
		2023	77	64,20	83,37
		2024	81	75	92,59
		2025	70	60.59	86,5

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan **Tabel** di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian **Nilai AKIP Kecamatan Wotu** mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada **Tahun 2022**, target yang ditetapkan sebesar **73**, dengan realisasi **63,24**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **86,63%**. Kinerja meningkat pada **Tahun 2023**, meskipun realisasi hanya **64,20** dari target **77**, capaian kinerja tercatat **83,37%**.Selanjutnya pada **Tahun 2024**, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana realisasi mencapai **75** dari target **81**, dengan capaian kinerja sebesar **92,59%**, menunjukkan perbaikan yang lebih optimal dibandingkan dua tahun sebelumnya. Namun pada **Tahun 2025**, meskipun target dinaikkan menjadi **82**, realisasi sementara baru mencapai **60.59**, sehingga capaian kinerja baru berada di angka 86,5**%**.

Nilai capaian tahun 2025 tersebut masih bersifat sementara karena proses penilaian AKIP oleh Inspektorat belum dilakukan secara menyeluruh dan baru berdasarkan hasil LHE Inspektorat Triwulan III Tahun 2025**.** Namun demikian, tren peningkatan target setiap tahunnya menunjukkan adanya **komitmen Kecamatan Wotu untuk terus memperbaiki kualitas akuntabilitas kinerja**, sehingga diharapkan nilai AKIP Tahun 2025 dapat meningkat setelah dilakukan penilaian secara penuh oleh Inspektorat pada tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam RENSTRA.

Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 terhadap Target jangka menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW IV 2025	Target Akhir Periode RENSTRA
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	70	60,59	72,25

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja sampai dengan **Triwulan IV Tahun 2025** menunjukkan nilai **60,59 (B)**, yang berarti belum mencapai target jangka menengah. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terdapat **ASN yang belum melakukan penginputan SKP**, **Dokumen Pelaporan Kinerja yang masih banyak butuh perbaikan**, serta **rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti**. Nilai tersebut masih merupakan hasil penilaian sementara (triwulanan) dan dapat mengalami perubahan setelah pelaksanaan penilaian AKIP tahunan oleh Tim Evaluator Inspektorat pada awal tahun berikutnya.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yag dilakukan.

a. Faktor penyebab kebehasilan

1) **Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan**, Dokumen perencanaan seperti Renja, PK, serta dokumen pelaporan seperti Laporan Kinerja Triwulan telah tersusun tepat waktu sehingga

memenuhi sebagian unsur penilaian akuntabilitas kinerja.

2) **Komitmen Internal Aparatur***,* Adanya komitmen pimpinan dan aparatur untuk memperbaiki administrasi kinerja telah mendorong terlaksananya beberapa program penguatan pengendalian internal, meskipun belum optimal
3) **Adanya upaya perbaikan melalui evaluasi internal**, meskipun belum optimal, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas kinerja organisasi.
4) **Adanya Perbaikan Kinerja Output dan outcome,** dimana semua dokumentasi kinerja output dan outcome telah diselesaikan melalui pelengkapan data kinerja dan bukti dukung, sehingga seluruh indikator kini dapat dinilai secara optimal.

b. Faktor Kegagalan / Penurunan Kinerja

1) **Pengukuran dan Pengendalian Kinerja** Belum Sistematis, Pemantauan capaian indikator oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan belum berjalan sesuai interval, menyebabkan ketidakteraturan data serta lemahnya pengendalian atas kegiatan yang tidak mencapai target.
2) **Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Kinerja**, Penyimpanan data kinerja dan bukti dukung masih dilakukan secara manual, sehingga proses penelusuran, konsolidasi, dan penyajian data membutuhkan waktu dan rawan ketidaktepatan.
3) **Kapasitas SDM SAKIP Masih Perlu Ditingkatkan,** Sebagian aparatur belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai metode penyusunan indikator, perhitungan kinerja, serta penyusunan laporan evaluasi. Dampaknya terlihat pada kualitas narasi, konsistensi data, dan ketepatan indikator.

c. Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

1) Peningkatan Kapasitas ASN: Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja agar seluruh pegawai memahami indikator, target, dan rencana aksi.

2) **Penguatan Evaluasi Internal:** Melaksanakan rekomendasi perbaikan dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
3) **Peningkatan Keterlibatan Pimpinan:** Menetapkan jadwal rapat kinerja secara berkala dengan notulen dan bukti dukung untuk memastikan pengendalian kinerja berjalan efektif.
4) **Perbaikan Dokumen Pelaporan:** Menyusun laporan yang lebih informatif, memuat analisis capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan secara lengkap serta mempublikasikannya melalui Website PPID.

5. Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber daya

a. Efesiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung Kecamatan Wotu, dilakukan beberapa efisiensi angggaran yaitu :

1) Efisiensi anggaran pada belanja peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan perbaikan sehingga layak untuk digunakan Kembali.
2) Efesiensi Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kewajaran dalam pengadaan konsumsi. dan menyesuaikan dengan waktu pelakasnaan rapat , serta mengoptimalkan rapat daring.
3) Efesiensi Perjalanan Dinas dilaksanakan melalui seleksi kegiatan yang benar-benar prioritas, penggabungan agenda perjalanan, serta pemanfaatan teknologi komunikasi daring untuk menekan biaya tanpa mengurangi kinerja.

b. Efesiensi Sumber Daya

1) Keterbatasan jumlah ASN pada Kecamatan Wotu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dioptimalkan melalui penugasan rangkap sebagai pelaksana harian serta pemanfaatan tenaga upah jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

2) Optimalisasi peralatan yang tersedia dilakukan melalui pemeliharaan peralatan kantor secara berkala guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ASN..

Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 (Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah) terdiri dari 1 program, 8 Kegiatan, dan 32 Subkegiatan. Dengan alokasi anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 2.894.625.435 dengan realisasi sebesar Rp 2.799.749.833 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 96.72%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja tahun berikutnya

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran s.d Triwulan IV 2025	Realisasi s.d Triwulan IV 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	70	60.59	86,55%	Rp.2.894.625.435	Rp.2.799.749.833	96,72%

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dari selisih antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran terhadap capaian kinerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Efesiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\textit{Realisasi Biaya}}{\textit{Target Biaua}} x\ 100\%\right)$$

Berdasarkan data yang ada, diperoleh **tingkat efisiensi biaya sebesar 3.28%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih mampu menghasilkan capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang relatif hemat.

Dengan realisasi anggaran sebesar 96.72**%**, capaian kinerja Kecamatan Wotu pada Triwulan IV Tahun 2025 baru mencapai **86.55 %**. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran **belum sepenuhnya efisien**, karena peningkatan belanja tidak diikuti oleh capaian kinerja yang sebanding. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam pengelolaan kegiatan agar setiap alokasi anggaran dapat menghasilkan output kinerja yang lebih optimal

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam Pencapaian sasaran Strategis I (Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah) didukung oleh satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Indikator Program ini adalah *Persentase Kegiatan penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar* dengan Formulasi jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan.

Berdasarkan data capaian kinerja pada Triwulan IV, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan menunjukkan progres yang **baik**, dengan tingkat capaian berada pada kisaran 100%**.** Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan Kinerja mencapai target yang direncanakan.

Secara keseluruhan, kinerja Triwulan IV dapat dinyatakan **sangat baik**, karena seluruh rangkaian kegiatan berada dalam rentang capaian sangat tinggi.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Target s.d TW IV	Realisasi s.d TW IV	Capaian
1	**Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**		**Persentase Kegiatan penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terpenuhinya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi dengan baik	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun (Dokumen)	**2 Dok**	2 Dok	2 Dok	100%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	**2 Dok**	2 Dok	2 Dok	100%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DKA-SKPD (Dokumen)	**2 Dok**	2 Dok	2 Dok	100%
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	**10 Lap**	10 Lap	10 Lap	100%

1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	**19 Org/Bln**	19 Org/Bln	19 Org/Bln	**100%**
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD (Laporan)	**12 Lap**	12 Lap	12 Lap	100%
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	terlaksananya administrasi BMD yang diadministrasikan tepat waktu	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasikan sesuai standar	**100%**	**100%**	**100%**	***100%***
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	**4 Lap**	4 Lap	4 Lap	100%
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengelolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	**12 Lap**	12 Lap	12 Lap	100%

1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	**2 Org**	2 Org	2 Org	*100%*
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**	**100%**	***100%***
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	**9 Paket**	9 Paket	9 Paket	100%
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)	**6 Paket**	6 Paket	6 Paket	100%
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	**3 Paket**	3 Paket	3 Paket	100%
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	**42 Dokumen**	32 Dokumen	32 Dokumen	100%
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	**12 Lap**	9 Lap	9 Lap	100%
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	**12 Lap**	9 Lap	9 Lap	100%
1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	tersedianya BMD perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah penunjang yang terpenuhi	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	**2 Unit**	2	2	100%

1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**100%**	**100%**	**100%**	***100%***
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	**12 Lap**	12 Lap	12 Lap	100%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	**12 Lap**	12 Lap	12 Lap	100%
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	**2 Lap**	1 Lap	2 Lap	100%
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	**12 Lap**	12 Lap	12 Lap	100%
1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	**100%**	**100%**	**100%**	***100%***
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya (Unit)	**6 Unit**	6 Unit	6 Unit	100%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	**21 Unit**	21 Unit	21 unit	100%
1.8.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	**2 Unit**	2 Unit	2 unit	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** pada Triwulan IV Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berlangsung Sangat baik. Sementara itu, realisasi anggaran yang mencapai **96,72%** menunjukkan bahwa penggunaan anggaran masih lebih rendah dibandingkan capaian kinerjanya. Kondisi ini mencerminkan adanya indikasi efisiensi, namun tetap diperlukan penelaahan lebih lanjut untuk memastikan bahwa rendahnya serapan anggaran bukan disebabkan oleh penundaan pelaksanaan kegiatan maupun kendala administratif. Secara keseluruhan, hubungan kedua capaian tersebut menunjukkan bahwa program telah berjalan efektif dengan pemanfaatan anggaran yang relatif hemat.

Dokumentasi Kegiatan Penunjang SKPD

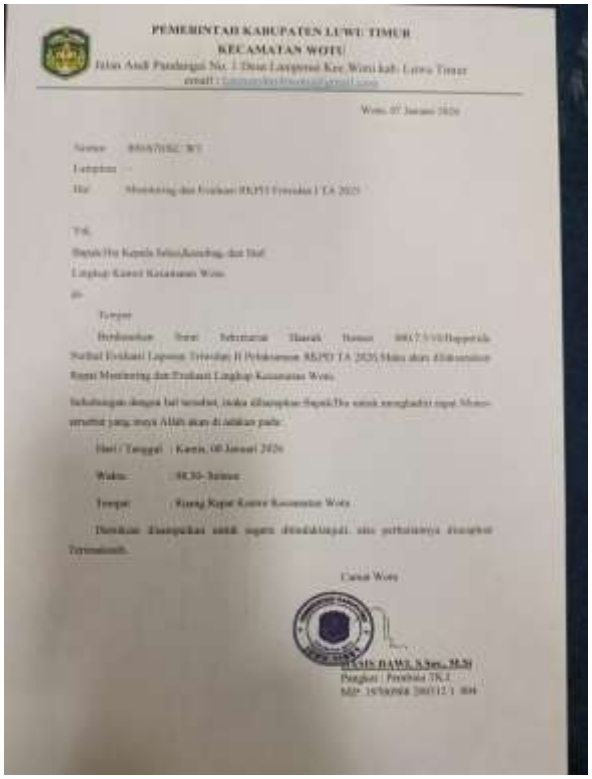

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WOTU
Jalan Andi Pandanga No. 1 Desa Lampenai Kec.Wotu kab. Luwu Timur

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WOTU
Jalan Andi Pandanga No. 1 Desa Lampenai Kec.Wotu kab. Luwu Timur

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat : Ruang Rapat Kantor Kecamatan Wotu
Perihal :

No	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Monev Internal OPD Triwulan IV 2025

KESIMPULAN

1. Capaian kinerja pada sasaran **"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"** sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar **100%**, yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formulasi indikator kinerja yaitu:

$$\boldsymbol{Capaian\ Kinerja} = \frac{\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja}}{\boldsymbol{Target\ Kinerja}} \boldsymbol{x100}$$

$$= \frac{\mathbf{100}}{\mathbf{100}} \boldsymbol{x100}$$

$$= \mathbf{100\%}$$

- Dalam mencapai sasaran kinerja, Kecamatan Wotu didukung oleh **alokasi anggaran** yang telah direncanakan dalam **DPA-SKPD Kecamatan Wotu** hingga **Triwulan IV Tahun Anggaran 2025** sebesar **Rp.2.890.425.435**,-**,** dengan **realisasi keuangan** yang telah terserap sebesar **Rp.2.795.549.833**,**-** atau **81,78%** dari total anggaran yang dialokasikan.

3.2.2. Capaian Sasaran Strategis II

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat"

Sasaran ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai misi ke-5 Kabupaten Luwu Timur sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 yaitu ***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif"*** dengan Sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**". Sasaran ini di dukung oleh kantor kecamatan Wotu Sebagai *Leading Sector* pada instansi pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Adapaun Indikator yang di gunakan untuk melihat pencapaian Sasaran Strategis I Kecamatan Wotu ini adalah **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** . Pengukuran penilaian IKM di peroleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan layanan pada loket yang tersedia di Kantor Kecamatan Wotu. Kemudian hasil dari responden ini di proses menggunakan Formula sebagai berikut:

$$IKP = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Parameter}{Total\ Parameter\ yang\ Terisi}\ x\ Nilai\ Penimbang$$

$$\boxed{\boldsymbol{IKM = Total\ Seluruh\ IKP\ x\ 25}}$$

Dimana:

$$Nilai\ Penimbang = \frac{1}{jumlah\ Parameter}$$

1. **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025**

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor Kecamatan Wotu. Instrumen kuesioner ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus menjadi umpan balik (*feedback*) terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 170 responden, diperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Wotu sebagaimana diuraikan pada data berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realiasasi TW IV 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85.15	100.17%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.2, Target yang di tetapkan di tahun 2025 yaitu sebesar 85 dan terealisasi pada Triwulan IV Senilai 85,15 dengan tingkat persentase 100,17% dari target yang direncanakan. Realisasi ini termasu Sangat Memuaskan.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dan beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2022	78	90,65	116,22%
		2023	80	78,25	97,81%
		2024	82	78,6	95,85%
		2025	85	85,15	100,17%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas, dapat dilihat bahwa Pada tahun 2022 Realisasi capaian Nilai IKM itu sebesar 90,65 dan pada tahun 2023-2024 Mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga Angka 78, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dan Rasionalisasi Metode Perhitungan Nilai IKM. Namun Pada Triwulan IV Tahun 2025 Kecamatan Wotu sudah berhasil meningkatkan Kinerja Pelayanannya hingga di Peroleh Nilai IKM Sebesar 85,15. Capaian ini telah melampaui target namun tentu terus di

lakukan upaya upaya perbaikan dan mempertahankan Kualitas Pelayanan yang baik.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025Dengan Target Jangka Menengah Dalam RENSTRA.**

Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 terhadap Target jangka menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Target Akhir Periode RENSTRA
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85,15	86,50

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar **85,15**, capaian ini telah **melampaui Target** Tahun 2025 sebesar 85. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Wotu sudah berada pada kategori baik dan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan **Target Akhir Periode Renstra sebesar 86,50**, maka tingkat capaian IKM saat ini telah mencapai sekitar **98,5%** dari target akhir. Hal ini menandakan bahwa kinerja pelayanan publik sudah sangat mendekati sasaran jangka menengah yang direncanakan. Dengan capaian tersebut, diperlukan upaya yang konsisten dan lebih optimal dari aparatur Kecamatan Wotu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kepuasan masyarakat, serta mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar target akhir Renstra dapat tercapai secara penuh.

Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan bahwa diperlukan peningkatan SDM petugas pelayanan melalui Coaching/bimtek,

Menyiapkan sarana dan prasarana dan Membuat spanduk/papan informasi terkait syarat.

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yag dilakukan.**

   a. **Faktor penyebab keberhasilan**

      1) **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat telah menunjukkan peningkatan dari aspek kecepatan, kejelasan prosedur, serta sikap petugas. Upaya perbaikan terhadap budaya kerja aparatur turut berdampak pada peningkatan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

      2) **Pemanfaatan Teknologi Informasi**, Walaupun belum optimal, penggunaan sarana teknologi informasi dalam mendukung proses pelayanan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, sehingga mengurangi potensi ketidakpahaman dan meningkatkan efisiensi proses pelayanan.

      3) **Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan,** Perbaikan sarana ruang pelayanan, ruang tunggu, dan ketersediaan fasilitas pendukung lainnya telah meningkatkan kenyamanan masyarakat selama proses pelayanan berlangsung.

      4) **Komitmen Aparatur Terhadap Pelayanan,** Kedisiplinan, tanggung jawab, serta etika pelayanan yang terus dijaga oleh aparatur menjadi faktor penting yang meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.

   b. **Faktor Penyebab Kegagalan**

      1) **Beban Layanan yang Meningkat**, Pertumbuhan kebutuhan administrasi masyarakat menyebabkan peningkatan volume pekerjaan, sementara jumlah SDM tidak bertambah. Kondisi ini berpengaruh terhadap waktu pelayanan, terutama pada jam-jam pelayanan puncak.

      2) **Belum Optimalnya Implementasi Layanan Digital**, Sebagian proses administrasi masih dilakukan secara manual. Ketidaksiapan sebagian masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis digital

menjadi kendala tersendiri, sehingga proses pelayanan masih bergantung pada layanan tatap muka.

3) **Variasi Kualitas Pelayanan Antar Petugas,** Standar pelayanan antar petugas belum sepenuhnya seragam. Perbedaan kemampuan komunikasi, pemahaman SOP, dan kecepatan kerja berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap konsistensi mutu pelayanan.
4) **Minimnya Sosialisasi Informasi Pelayanan**, Distribusi informasi terkait persyaratan, alur layanan, dan estimasi waktu penyelesaian belum sepenuhnya merata kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada terjadinya kesalahan administrasi atau pengulangan proses berkas yang memengaruhi kepuasan.

c. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) **Optimalisasi Layanan Berbasis Digital,** Mengembangkan sistem layanan administrasi secara online, termasuk antrian digital, informasi layanan elektronik, serta sistem pengaduan berbasis daring yang mudah diakses masyarakat.
2) **Peningkatan Kompetensi Aparatur**, Melaksanakan pelatihan pelayanan prima, pembekalan SOP, serta penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK agar seluruh aparatur dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif, cepat, dan komunikatif.
3) **Perbaikan dan Penataan Proses Pelayanan**, Melakukan evaluasi terhadap prosedur pelayanan dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak efektif. Penetapan standar waktu penyelesaian yang lebih jelas dan terukur juga diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
4) **Penguatan Sarana dan Prasarana Pelayanan**, Melengkapi fasilitas layanan seperti ruang tunggu yang lebih nyaman, penyediaan papan informasi layanan, serta perbaikan fasilitas antrian untuk mendukung kenyamanan pengguna layanan.
5) **Penguatan Mekanisme Survei dan Pengaduan Masyarakat**, Melaksanakan survei IKM secara berkala serta menyediakan kanal pengaduan yang responsif untuk mengidentifikasi permasalahan secara cepat dan tepat.

6) Menggunakan standar operasional prosedur yang ada namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan sasaran Kantor Kecamatan Wotu.

5. Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber daya

a. Efesiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Wotu menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai target-target kinerja yang diharapkan.

Dengan target 85 dan realisasi 85,15 Kecamatan Kalipuro berhasil mencapai capaian 100,17%. Hal ini menunjukkan efisiensi yang baik dalam penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Realisasi anggaran yang mencapai 96,99% juga menunjukkan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif untuk mendukung program-program yang berfokus pada pelayana publik.

Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja utama, program,target, realisasi, dan capaian kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan IV 2025

asaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran s.d Triwulan IV 2025	Realisasi s.d Triwulan IV 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85,15	100,17%	Rp. 114.102.400	Rp.110.672.350	96.99%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100%	75%	75%	Rp. 6.019.500	Rp. 6.001.000	96.69%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100%	87,5%	87,5%	Rp.9.175.000	Rp.6.956.000	99.27%

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	75%	75%	Rp.9.175.000	Rp.6.956.000	*75.81%*
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100%	75%	75%	Rp.25.248.500	Rp.24.752.000	*98.03%*
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100%	0%	0%	Rp.5.059.650	Rp.4.867.100	*96.19*

Sumber:Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kempampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Wotu sebesar 100,19% dengan Penyerapan anggaran sebesar 96.99%, **sehingga persentase efesiensi biaya adalah 3.01%** . Persentase Efesiensi ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efesiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaua}\ x\ 100\%\right)$$

6. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   a. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan untuk mendukung efektivitas tugas Camat dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh **Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan**, yang meliputi tiga bidang utama. Pertama, **pengelolaan layanan PPID Kecamatan**, yang memastikan tersedianya informasi publik secara transparan melalui pengelolaan Daftar Informasi Publik, pelayanan permohonan informasi, dan penyampaian laporan PPID kepada PPID Utama. Kedua, **pelayanan administrasi pemerintahan**, yang mencakup penerbitan berbagai surat keterangan, verifikasi dokumen pelayanan, serta fasilitasi administrasi kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. Ketiga, **monitoring dan evaluasi retribusi desa**, yang dilakukan untuk memastikan tertib administrasi, ketepatan pelaporan, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan retribusi di desa.

Sasaran dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah meningkatnya capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat kecamatan. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan IV Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai **100%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam program telah sepenuhnya dilaksankan dan mencapai target yang telah di tetapkan.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang

dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$Capaian\ Kinerja(\%) = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right) x100\%$$

$$= \left(\frac{100}{100}\right) x100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan , adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	100%	100%
2.1	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100	100%	100%
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Lap	12 Lap	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Pelayanan Publik di Kecamatan Wotu (Yang terdiri dari Pengurusan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah, KTP, Akta Kematian, Akta Kelahiran dan Akta Nikah)

Monitoring dan Evaluasi Hasil PBB di Desa-Desa Kecamatan Wotu

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan untuk memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan desa. Melalui Subkegiatan *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*, kecamatan mendorong keterlibatan aktif warga dan lembaga kemasyarakatan desa dalam penyusunan rencana pembangunan, termasuk fasilitasi musrenbang desa dan pendampingan dalam merumuskan usulan prioritas.

Sementara itu, Subkegiatan *Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* lebih banyak diwujudkan melalui pembinaan dan dukungan terhadap kegiatan PKK di desa-desa. Kegiatan mencakup koordinasi, monitoring pelaksanaan program PKK, fasilitasi gerakan pemberdayaan keluarga, serta penguatan kapasitas kader agar kegiatan pemberdayaan berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, program ini berfokus pada peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK. Sasaran dari Program ini adalah Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Hasil Pengukuran keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator kinerjanya yaitu : ***Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar*** ,dengan target kinerja sebesar 100% tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan IV Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai **100%** dari target yang telah ditetapkan .Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam program telah sepenuhnya dilaksankan dan mencapai target yang telah di tetapkan.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah

direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$Capaian\ Kinerja(\%) = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right) x100\%$$

$$= \left(\frac{100}{100}\right) x100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 subkegiatan , adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12 Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyaraka Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar	100%	100%	100%
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemeberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	100%	100%
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Mendampingi Tim Penilai Lomba Desa Sehat Di Desa Cendana Hijau yang Mewakili Desa Sehat Tingkat Kabupaten Luwu Timur

Menghadiri Rapat Bulanan PKK Tingkat Kabupaten Luwu Timur

Menghadiri Kegiatan Pkk Mengaji Oleh Pokja I Tim Penggerak Pkk Kab. Luwu

Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Dasa Wisma

c. Program Koordinasi dan Ketentraman Ketertiban Umum

Program Koordinasi dan Ketenteraman Ketertiban Umum dilaksanakan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah kecamatan melalui kerja sama yang erat dengan berbagai unsur terkait. Kecamatan berperan mengoordinasikan upaya pengamanan wilayah bersama Kepolisian, TNI, dan instansi vertikal lainnya, termasuk dalam penanganan kriminalitas, potensi gangguan ketertiban, serta pengamanan kegiatan masyarakat yang membutuhkan dukungan aparat.

Di sisi sosial kemasyarakatan, kecamatan turut memfasilitasi hubungan yang harmonis antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur kelembagaan desa guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan sosial, seperti perselisihan warga dan sengketa lahan, serta menjaga stabilitas dan kerukunan di masyarakat. Kecamatan juga menjalin sinergi dengan perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah, termasuk Satpol PP, terutama dalam kegiatan penertiban, pengamanan acara, dan penanganan situasi yang berpotensi mengganggu ketenteraman umum.

Selain itu, program ini mencakup peran kecamatan dalam menangani kejadian bencana alam dan kebakaran. Kecamatan melakukan koordinasi cepat dengan BPBD, Damkar, dan instansi terkait untuk memastikan respons darurat berjalan efektif, termasuk pelaporan insiden, mobilisasi personel dan sumber daya, serta fasilitasi penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Secara keseluruhan, program ini bertujuan mewujudkan wilayah kecamatan yang aman, tertib, dan responsif terhadap berbagai isu keamanan maupun kedaruratan melalui sinergi kuat antarinstansi dan kolaborasi dengan masyarakat.

Sasaran dari Program Koordinasi dan Ketertiban Umum adalah Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***Persentase Rata-rata capaian kinerja***

pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang Berjalan Sesuai Standar, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan IV Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai 100**%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam program telah sepenuhnya dilaksankan dan mencapai target yang telah di tetapkan.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$Capaian\ Kinerja(\%) = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right) x100\%$$

$$= \left(\frac{100}{100}\right) x100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 subkegiatan , adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13 Pencapaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar	100%	100%	100%
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	100%	100%
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Terlaksananya Sinergitas dengan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	4 Lap	4 Lap	100%

	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Lap	4 Lap	100%
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Lap	4 Lap	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Koordinasi/sinergitas dgn kepolisian dan tni terkait pembagaian bendera merah putih dlm menyambut hut ri ke 80

Sinergitas dgn TNI terkait mediasi tanah/lokasi sekolah dasar duloloe dan lampena

Sinergitas dengan perangkat daerah terkait peraturan perundang-undangan sekalgus rakor tentang pengaktifan siskamling utk mendukung kondusifitas di wiayah kec. Wotu

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan untuk memastikan kelancaran fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan melalui koordinasi lintas sektor bersama unsur Forkopimcam. Program ini mencakup kegiatan pemantauan dan pengendalian kondisi wilayah, fasilitasi penyelesaian berbagai isu pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, serta penguatan koordinasi antara kecamatan, Kepolisian, TNI, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait.

Dalam pelaksanaannya, kecamatan berperan mengkoordinasikan pertemuan rutin Forkopimcam untuk membahas situasi keamanan, ketertiban, dan perkembangan wilayah, termasuk langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan, ketenteraman masyarakat, dan ketahanan wilayah. Kegiatan ini juga mencakup dukungan terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah di wilayah kecamatan, penanganan permasalahan lintas desa, serta monitoring terhadap implementasi program pemerintah di tingkat bawah.

Melalui sinergi yang kuat antara seluruh unsur Forkopimcam, program ini bertujuan memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berjalan efektif, responsif, dan mampu menghadapi dinamika sosial di masyarakat, sehingga tercipta kondisi wilayah yang stabil, tertib, dan kondusif bagi pembangunan.

Sasaran dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan IV Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai 100**%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam program

telah sepenuhnya dilaksankan dan mencapai target yang telah di tetapkan.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$Capaian\ Kinerja(\%) = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right) x100\%$$

$$= \left(\frac{100}{100}\right) x100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan , adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentas capaian Kinerja Penyelenggaraa Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar	100%	100%	100%
5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terselenggaranya Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100	100%	100%
2.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Lap	12 Lap	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Monitoring dan Evaluasi APBDES Kecamatan Wotu

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Melalui program ini, kecamatan melakukan monitoring terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes, termasuk penelaahan dokumen,

evaluasi kegiatan, serta memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan akuntabel dan tepat sasaran.

Program ini juga mencakup pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan realisasi fisik dan keuangan. Dalam prosesnya, kecamatan memberikan pembinaan administratif, pendampingan penyelesaian masalah, serta memastikan setiap kegiatan desa berjalan sesuai aturan.

Untuk memperkuat kualitas pembinaan, kecamatan melakukan koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait, baik dalam hal regulasi, teknis pelaksanaan, maupun penyelesaian permasalahan yang memerlukan dukungan lintas sektor. Dengan demikian, program ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan desa secara konsisten dan terarah.

Sasaran dari Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran hingga Triwulan IV Tahun 2025, capaian program baru mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam program telah sepenuhnya dilaksankan dan mencapai target yang telah di tetapkan.Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang direncanakan, kemudian dinyatakan dalam persentase sesuai formulasi pengukuran kinerja yang berlaku.

$$Capaian\ Kinerja(\%) = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right) x100\%$$

$$= \left(\frac{100}{100}\right) x100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan , adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11 Pencapaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar	100%	100%	100%
6.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	100%	100%
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Lap	34 Lap	100%
6.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Pembanguan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	17 Lap	17 Lap	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

RKPDES 2025 Kecamatan Wotu

KESIMPULAN

- Capaian kinerja pada sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat"** sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar **100,17%**, yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formulasi indikator kinerja yaitu:

$$\boldsymbol{Capaian\ Kinerja} = \frac{\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja}}{\boldsymbol{Target\ Kinerja}} \boldsymbol{x100}$$

$$= \frac{\mathbf{100,15}}{\mathbf{100}} \boldsymbol{x100}$$

$$= \mathbf{100,15}\%$$

- Dalam mencapai sasaran kinerja, Kecamatan Wotu didukung oleh **alokasi anggaran** yang telah direncanakan dalam **DPA-SKPD Kecamatan Wotu** hingga **Triwulan IV Tahun Anggaran 2025** sebesar **Rp. 114.102.400,-**, dengan **realisasi keuangan** yang telah terserap sebesar **Rp. 110.672.350,-** atau **96,99%** dari total anggaran yang dialokasikan.

3.3. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025**,** Kecamatan Wotu memperoleh alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 3.008.727.835 (Tiga Milyar Delapan juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp.2.971.427.835 dan belanja modal sebesar Rp. 37.300.000**.** Seluruh alokasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 6 program, 14 kegiatan, dan 32 sub kegiatan.

Berdasarkan realisasi anggaran Kecamatan Wotu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, serapan anggaran mencapai **96.73%** dari total pagu sebesar Rp. 3.008.727.835. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa sub kegiatan yang memerlukan percepatan pada triwulan berikutnya.

Pada Triwulan IV Tahun berjalan, seluruh program dan kegiatan Kecamatan Wotu telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan program yang berjalan optimal, efektif, dan sesuai dengan perencanaan. Seluruh indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik melalui dukungan koordinasi yang solid antar perangkat kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Kecamatan Wotu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di wilayahnya secara berkelanjutan..

Adapun target dan realisasi anggaran hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Triwulan IV 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASIANGGARAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025		SELISIH		SISA ANGGARAN 1 JANUARI S.D 31 Desember2 025		Persentase Capaian Anggaran sampai 30 Desember Tahun 2025
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	KECAMATAN WOTU	**3,008,727,835**	**3,008,727,835**	**2,910,422,183**	**96.73**	**98,305,652**	**3**	**98,305,652**		*96.73*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2,894,625,435**	**2,894,625,435**	**2,799,749,833**	**96.72**	**94,875,602**	**3.28**	**94,875,602**	*3.28*	*96.72*
01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***35,930,500***	***35,930,500***	**35,066,000**	***95.41***	***864,500***	***2.41***	***864,500***	***2.41***	*97.59*
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,805,000	16,805,000	16,640,000	99.02	165,000	*0.98*	165,000	*0.98*	*99.02*
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,554,950	3,554,950	3,000,000	84.39	554,950	*15.61*	554,950	*15.61*	*84.39*
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,724,850	2,724,850	2,702,000	99.16	22,850	*0.84*	22,850	*0.84*	*99.16*
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,845,700	12,845,700	12,724,000	99.05	121,700	*0.95*	121,700	*0.95*	*99.05*

02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***2,302,035,653***	***2,302,035,653***	**2,217,678,085**	***96.34***	***84,357,568***	***3.66***	***84,357,568***	***3.66***	*96.34*
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,278,815,653	2,278,815,653	2,194,758,085	*96.31*	84,057,568	*3.69*	84,057,568	*3.69*	*96.31*
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23,220,000	23,220,000	22,920,000	*98.71*	300,000	*1.29*	300,000	*1.29*	*98.71*
03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***10,290,000***	***10,290,000***	**9,080,000**	***88.24***	**2,850,000**	***27.70***	**1,210,000**	***11.76***	*88.24*
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,290,000	10,290,000	9,080,000	**88.24**	1,210,000	*11.76*	1,210,000	*11.76*	*88.24*
04	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***12,239,850***	***12,239,850***	**10,120,500**	*82.68*	*2,119,350*	*17.32*	*2,119,350*	*17.32*	*82.68*
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3,071,850	3,071,850	2,966,500	*96.57*	105,350	*3.43*	105,350	*3.43*	*96.57*
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9,168,000	9,168,000	7,154,000	*78.03*	2,014,000	*21.97*	2,014,000	*21.97*	*78.03*
05	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***251,756,800***	***251,756,800***	**251,179,600**	*99.77*	*577,200*	*0.23*	*577,200*	*0.23*	*99.77*

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,125,000	2,125,000	2,125,000	100.00	-	0.00	-	0.00	*100.00*
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,330,000	7,330,000	7,330,000	100.00	-	0.00	-	0.00	*100.00*
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11,799,800	11,799,800	11,298,000	95.75	501,800	4.25	501,800	4.25	*95.75*
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100.00	-	0.00	-	0.00	*100.00*
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	156,450,000	156,450,000	156,415,000	99.98	35,000	0.02	35,000	0.02	*99.98*
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69,852,000	69,852,000	69,811,600	99.94	40,400	0.06	40,400	0.06	*99.94*
06	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***37,300,000***	***37,300,000***	**35,342,400**	*94.75*	1,957,600	0.00	1,957,600	5.25	*94.75*
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,300,000	37,300,000	35,342,400	94.75	1,957,600	0.00	1,957,600	5.25	*94.75*
07	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***192,907,632***	***192,907,632***	**189,477,134**	*98.22*	*3,430,498*	*1.78*	*3,430,498*		*98.22*

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,173,750	13,173,750	13,060,500	99.14	113,250	0.86	113,250	0.86	*99.14*
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,748,882	37,748,882	37,511,634	99.37	237,248	0.63	237,248	0.63	*99.37*
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,025,000	5,025,000	5,025,000	100.00	-	0.00	-	0.00	*100.00*
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136,960,000	136,960,000	133,880,000	97.75	3,080,000	2.25	3,080,000	2.25	*97.75*
08	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***52,165,000***	***52,165,000***	**51,806,114**	*99.31*	*358,886*	*0.69*	*358,886*	*0.69*	*99.31*
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18,995,000	18,995,000	18,906,114	99.53	88,886	0.47	88,886	0.47	*99.53*
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,170,000	8,170,000	7,900,000	96.70	270,000	3.30	270,000	3.30	*96.70*

3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	-	0.00	-	0.00	*100.00*
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**6,019,500**	**6,019,500**	**6,001,000**	**99.69**	**18,500**	**0.31**	**18,500**	**0.31**	99.69
01	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***6,019,500***	***6,019,500***	**6,001,000**	**99.69**	**18,500**	**0.31**	**18,500**	**0.31**	99.69
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	6,019,500	6,019,500	6,001,000	99.69	18,500	0.31	18,500	0.31	99.69
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**68,599,750**	**68,599,750**	**68,096,250**	**99.27**	**503,500**	**0.73**	**503,500**	**0.73**	99.27
01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***68,599,750***	***68,599,750***	**68,096,250**	**97.98**	***503,500***	***0.73***	***503,500***	***0.73***	99.27
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11,512,950	11,512,950	11,057,950	96.05	455,000	3.95	455,000	3.95	96.05

2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57,086,800	57,086,800	57,038,300	99.92	48,500	0.08	48,500	0.08	99.92
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**9,175,000**	**9,175,000**	**6,956,000**	***75.81***	**2,219,000**	***24.19***	**2,219,000**	*24.19*	*75.81*
01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum***	***5,900,000***	***5,900,000***	**4,118,000**	***69.80***	***4,410,000***	***74.75***	***1,782,000***	***30.20***	*69.80*
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3,425,000	3,425,000	2,232,000	65.17	1,193,000	38.06	1,193,000	100.00	*65.17*
2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	2,475,000	2,475,000	1,886,000	76.20	589,000	30.60	589,000	100.00	*76.20*
02	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	***3,275,000***	***3,275,000***	**2,838,000**	***86.66***	**437,000**	**13.34**	**437,000**	**13.34**	*86.66*

1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*3,275,000*	*3,275,000*	2,838,000	86.66	(913,200)	-47.44	437,000	22.70	*86.66*
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**25,248,500**	**25,248,500**	**24,752,000**	*98.03*	**496,500**	**1.97**	**496,500**	**1.97**	*98.03*
01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***25,248,500***	***25,248,500***	**24,752,000**	***98.03***	***496,500***	***1.97***	***496,500***	***1.97***	*98.03*
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25,248,500	25,248,500	24,752,000	98.03	496,500	2	496,500	*1.97*	*98.03*
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**5,059,650**	**5,059,650**	**4,867,100**	***96.19***	**192,550**	**3.81**	**192,550**	**3.81**	*96.19*
01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***5,059,650***	***5,059,650***	***4,867,100***	***96.19***	***192,550***	***3.81***	***192,550***	***3.81***	*96.19*

1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3,134,850	3,134,850	2,962,300	94.50	172,550	5.50	172,550	5.50	*94.50*
4	Koordinasi Pelaksanaan Pembanguan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1,924,800	1,924,800	1,904,800	98.96	20,000	1.04	20,000	1.04	98.96
TOTAL BELANJA		**3,008,727,835**	**3,008,727,835**	**2,910,422,183**	**96.73**	**98,305,652**	**3.27**	**98,305,652**	**3.27**	96.73

Sumber: Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

Tabel 3.18 Permasalahan Dan Solusi Terkait Penyerapan Anggaran Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
	KECAMATAN WOTU			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			
1.1	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Target Kinerja telah tercapai dari 2 Dokumen dan terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,02%	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Target Kinerja telah tercapai dari 2 Dokumen dan terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 84,39%	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Target Kinerja telah tercapai dari 2 Dokumen dan terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,16%	
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja telah tercapai dari 10 Dokumen dan terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,05%	
1.2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Target Kinerja telah tercapai dari 19 Orang/Bulan selama 12 Bulan dan terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 96,31%	

1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 98,71%	
1.3	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 88,24%	
1.4	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 96,57%	
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Target Kinerja telah tercapai dari 2 Orang dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 78,03%, terdapat sisa anggaran karena bersifat di sediakan	Ke depan, dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan riil agar penganggaran lebih proporsional, serta mengoptimalkan sisa anggaran melalui penyesuaian atau realokasi sesuai ketentuan yang berlaku.
1.5	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Target Kinerja telah tercapai dari 9 Paket dan terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 100%	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Target Kinerja telah tercapai dari 6 Paket dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 100%	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Target Kinerja telah tercapai dari 3 Paket dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 95,75%	

1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Target Kinerja telah tercapai dari 3 Paket dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 100%	
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,98%	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,94%	
1.6	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target Kinerja telah tercapai dari 2 Paket dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,14%	
1.7	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,94%	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,31%	
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 100%	
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 97,75%	

1.8	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Target Kinerja telah tercapai dari 6 Unit dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,53%	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target Kinerja telah tercapai dari 21 Unit dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 96,70%	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Target Kinerja telah tercapai dari 2 Unit dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 100%	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			
2.1	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***			
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Limpahkan	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,69%	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			
3.1	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***			
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Target Kinerja telah tercapai dari 5 Lembaga Kemasyarakatan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 96,05%	

3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,92%	
4	**PROGRANM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			
4.1	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum***			
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Target Kinerja telah tercapai dari 4 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 65,17%, Terdapat sisa Anggaran Pada Belanja Makan dan minum Rapat dikarenakan pada tahun 2025, kegiatan lebih sering di adakan di Desa, sehingga biaya makan minum ditanggung Desa	Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran agar alokasi belanja makan dan minum disesuaikan dengan pola pelaksanaan kegiatan, serta mengoptimalkan sisa anggaran melalui realokasi pada sub kegiatan lain yang lebih prioritas
4.1.2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	Target Kinerja telah tercapai dari 4 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 76,20%, Terdapat sisa Anggaran Pada Belanja Makan dan minum Rapat dikarenakan pada tahun 2025, kegiatan lebih sering di adakan di Desa, sehingga biaya makan minum ditanggung Desa	Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran agar alokasi belanja makan dan minum disesuaikan dengan pola pelaksanaan kegiatan, serta mengoptimalkan sisa anggaran melalui realokasi pada sub kegiatan lain yang lebih prioritas
4.2	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***			
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Target Kinerja telah tercapai dari 4 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 86,66%	

	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			
5.1	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			
5.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,69%	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			
6.1	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Target Kinerja telah tercapai dari 34 Dokumen dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 94,50%	
6.1.2	Koordinasi pelaksanaan pembanguna kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Target Kinerja telah tercapai dari 17 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 98,96%	

Sumber: Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

3.4. Upaya Perbaikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya, telah dilakukan upaya perbaikan sebagai tindak lanjut Hasil LHE Inspektorat. Kecamatan Wotu telah menyusun dan melaksanakan berbagai upaya perbaikan guna menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan serta meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja Instansi. Upaya perbaikan ini dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

Dengan dilaksanakannya upaya perbaikan sebagai tindak lanjut LHE Inspektorat ini, diharapkan kualitas kinerja dan akuntabilitas Kecamatan Wotu pada triwulan berikutnya dapat meningkat serta mendukung pencapaian target kinerja tahunan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berikut disajikan Tabel Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat yang memuat temuan, rekomendasi, serta progres tindak lanjut yang telah dan sedang dilaksanakan.

Tabel 3.19 Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akip Inspektorat Triwulan Iii 2025

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Status /Progress Penyelesaian
	Perencanaan Kinerja				
1	Kasubag Perencana memastikan Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan (ditandatangani dan di stempel)	Dokumen Perencanaan telah di formalkan	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
2	Agar Pernjanjian Kinerja camat ditandatangani Bupati	Perjanjian Kinerja Camat telah di tandatangani Bupati	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
3	Agar kasubag Perencana mempublikasikan dokumen perencanaan jangka menengah dan pendek pada instansi pemerintah	Dokumen Perencanaan jangka menengah telah di publikasikan di Aplikasi PPID	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
4	Kasubag Perencana dalam membuat Dokumen Perencanaan Kinerja jangka pendek agar menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai (indicator kinerja dan target kinerja yang tergambarkan pada RENJA)	Renja telah memuat Indikator dan Target kinerja yang sesuai kebutuhan	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
5	Agar kasubag perencana menyelaraskan sasaran dan indicator sasaran pada IKU dengan RENJA dan RENSTRA.	Dokumen IKU telah di revisi dengan menyelaraskan sasaran dan indicator sasaran pada IKU dengan RENJA dan RENSTRA.	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
6	Perencanaan kinerja agar lebih memperhatikan tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan serta menyusun/memberikan penjelasan terhadap pohon kinerja/Cascading	Crosscutting telah dilakukan pada aplikasi si Pengendali-PD	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
6	Agar Kasubag Perencana menambahkan penjelasan secara spesifik terkait indicator kepuasan masyarakat yaitu IKM unit Pelayanan	Penjelasan terkait Capaian indicator IKM telah di muat secara jelas pada laporan Triwulan II dan III	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
					Telah di Tindak lanjuti
8	Melengkapi IKU dengan definisi Operasional serta analisis yang lebih spesifik	Dokumen IKU telah direvisi dengan menambhkan Definisi Operasional dan di formalkan.	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
9	Menyesuaikan dokumen PK dengan target Sasaran strategis yang ada pada IKU	Sasaran pada PK dan IKU telah disesuaikan.	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
10	Camat melakukan pemantauan pengukuran kinerja secara berjenjang	Camat, Sekcam,Kasi/Kasubag,dan	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti

	dan melampirkan bukti Pelaksanaan (Notulensi, Berita Acara dan daftar hadir rapat)	semua staf telah melakukan Evaluasi Triwulan.			
11	Memastikan dokumen SKP yang telah dibuat telah diformalkan	Dokumen SKP telah di Formalkan	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
					Telah di Tindak lanjuti
12	Memastikan dokumen Laporan Kinerja yang telah dibuat telah diformalkan	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
13	Memastikan dokumen Laporan kinerja di lengkapi dengan bukti pelaksanaan Evaluasi internal Noutulen, /Berita acara hasil dan daftar hadir rapat pembahasan capaian kinerja)	Pada Dokumen Laporan kinerja telah dilamprikan Noutulen, /Berita acara hasil dan daftar hadir rapat pembahasan capaian kinerja	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
14	Memastikan dokumen Kinerja dilengkapi dengan upaya perbaikan kinerja kedepan	Dokumen Pelaporan kinerja telah memuat Uapaya Perbaikan Kinerja kedepannya	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
15	Memastikan dokumen Laporan kinerja dilengkapi dengan Efesiensi atas Penggunaan sumber daya	Laporan Kinerja tela memuat Efesiesni atas sumber daya	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
15	Melengkapi Laporan kinerja dengan Notulensi rapat, Daftar Hadir, dan Dokumentasi saat melakukan Rapat Evaluasi internal	Laporan kinerja telah menampilkan Bukti Evaluasi kinerja berupa, Notulensi Rapat.	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
16	Melengkapi Laporan kinerja dengan Notulensi rapat, Daftar Hadir, dan Dokumentasi saat melakukan Rapat Evaluasi internal	Laporan kinerja telah dilengkapi dengan Notulensi rapat, Daftar Hadir, dan Dokumentasi saat melakukan Rapat Evaluasi internal	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
					Telah di Tindak lanjuti
17	Melengkapi Laporan kinerja dengan Notulensi rapat, Daftar Hadir, dan Dokumentasi saat melakukan Rapat Evaluasi internal	Laporan kinerja telah dilengkapi dengan Notulensi rapat, Daftar Hadir, dan Dokumentasi saat melakukan Rapat Evaluasi internal	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
	Melampirkan Matriks tindak lanjut LHE sebelumnya	Melampirkan Matriks tindak lanjut LHE sebelumnya telah dilampirkan pada laporan kinerja.	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti
18	Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas dan efesiensi kinerja	Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas dan efesiensi kinerja	Tahun 2025	Tahun 2025	Telah di Tindak lanjuti

3.5. Budaya Kerja Mempengaruhi Pencapaian Organisasi

Budaya kerja merupakan cerminan nilai, sikap, dan perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Budaya kerja yang baik akan membentuk lingkungan kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, budaya kerja yang positif menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Pencapaian kinerja yang baik berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan penguatan budaya kerja organisasi. Kinerja yang tercapai sesuai target akan menumbuhkan semangat kerja, motivasi, serta rasa memiliki (sense of belonging) terhadap organisasi. Sebaliknya, capaian kinerja yang belum optimal dapat menjadi refleksi bagi organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap disiplin, pola kerja, dan efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, konsistensi pencapaian kinerja menjadi faktor penting dalam menjaga budaya kerja yang produktif dan adaptif.

Dalam upaya memperkuat budaya kerja dan meningkatkan pencapaian kinerja, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu menginternalisasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK sebagai panduan perilaku kerja, yaitu: Berorientasi Pelayanan (memberikan pelayanan cepat, tepat, dan solutif), Akuntabel (bertanggung jawab dan transparan), Kompeten (selalu meningkatkan kapasitas diri), Harmonis (membangun kerja sama dan menghargai perbedaan), Loyal (setia pada bangsa dan nilai organisasi), Adaptif (terbuka terhadap perubahan dan inovasi), serta Kolaboratif (bekerja sama untuk hasil terbaik).

Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK secara konsisten akan memperkuat budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi hasil, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

BAB IV

PENUTUP

Kecamatan Wotu telah menetapkan dua sasaran strategis yang selaras dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Wotu 2025–2029. Penetapan sasaran tersebut bertujuan untuk menjamin keselarasan antara tujuan organisasi dengan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kecamatan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan bahwa Seluruh Program, Kegiatan dan Sub kegiatan telah dilaksanakan sepenuhnya dan **Capaian Kinerja** telah mencapai target yang di tetapkan yaitu sebesar **100%**. Indikator sasaran pertama**, Indeks Kepuasan Masyarakat, mencapai 85,15 dari target 85**, menunjukkan tingkat kepuasan yang sudah baik dan meningkat dari perolehan Triwulan sebelumnya namun belum memenuhi target. **Indikator sasaran kedua, Nilai AKIP, masih mengacu pada penilaian sementara Triwulan III sebesar 60,59** karena penilaian resmi Tahun 2025 baru dilakukan pada Triwulan I 2026. Sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 96,73%.

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Wotu pada periode Laporan ini merupakan hasil dari komitmen, dedikasi, dan kerja sama seluruh jajaran aparatur dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, dan acuan dalam peningkatan kualitas kinerja Kecamatan Wotu pada periode selanjutnya.

Demikian **Laporan Kinerja Kecamatan Wotu Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV** disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi sarana perbaikan berkelanjutan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kecamatan Wotu.

Wotu,07 Januari 2025
Camat Wotu,

ASIS DAWI, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19700908 200312 1 004